PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Ahmad Saleh

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email : ahmad.saleh@fh.unila.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pendekatan normatif disimpulkan bahwa, *pertama*, peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, baik dengan cara tertulis, lisan, ikut terlibat dalam diskusi atau seminar, *kedua*, DPRD tidak dapat menolak kehendak-kemauan masyarakat melaksanakan partisipasinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kearifan lokal.

Kata kunci : *insiatif, pembentukan perda dan kebutuhan masyarakat.*

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1)). Dan Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sistem negara kesatuan, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang secara umum dapat menghubungkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Pertama*, sentralisasi, adalah segala urusan, fungsi, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara

dekonsentrasi. *Kedua*, desentralisasi, adalah segala urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (6)). Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota/kabupaten. Peraturan Daerah Provinsi Lampung adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan perundang-undangan mencakup keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-

undang dan bersumber pada kekuasaan legislatif, maka jenis-jenis peraturan perundang-undangan ialah undang-undang dan peraturan lain yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi dari undang-undang.¹ Oleh karena itu peraturan perundang-undangan tertentu dan terbatas jenisnya, mengingat kewenangan atribusi bersifat tertentu dan terbatas, sedangkan kewenangan delegasi juga tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut tanpa persetujuan yang mendelegasikannya (*delegatus non potest delegare*).

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah mengusulkan rancangan peraturan daerah inisiatif, yang tata cara mekanisme pengajuan usul inisiatif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah yang baik adalah peraturan daerah yang disusun sesuai dengan mekanisme dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah yang akan diusulkan oleh DPRD Kabupaten harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan suatu kajian yang dapat menghimpun kebutuhan dari masyarakat Kabupaten tersebut.

Sehingga untuk mewujudkan masyarakat pada suatu keadaan tertentu dan pencapaian kesejahteraan kemajuan daerah serta penyelesaian masalah sosial adalah sebuah bentuk perda yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara garis besar peruntukannya untuk semua elemen pemerintahan dan masyarakat yang ada disuatu daerah.

Perda merupakan pengaturan lebih khusus guna mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan publik dan pengaturan hak dan kewajiban warga negara, namun dalam prakteknya memunculkan pertanyaan apakah pembentukan perda memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian?

II. Pembahasan

2.1. Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Perda

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004, Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketiga fungsi tersebut diselenggarakan dalam kerangka representasi masyarakat di daerah. Sedangkan Fungsi Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah (PERDA), dalam

¹ A.Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (Disertasi)*, 1990, hlm.349.

arti luas fungsi legislasi daerah merupakan fungsi DPRD untuk membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Melalui fungsi legislasi ini DPRD dapat memberikan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta merupakan suatu proses untuk mengkomodir berbagai kepentingan DPRD sebagai salah satu lembaga konstitusi mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah, dengan kewenangan itu dituntut tanggung jawab untuk melahirkan peraturan daerah yang memenuhi persyaratan²

Pencapaian upaya-upaya menuju kemanfaatan mau tidak mau unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) dituntut lebih meningkatkan kualitas, kemampuan dan kapabilitas dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dilihat dari proses, legislasi membutuhkan partisipasi masyarakat yang kuat, sedangkan dari sisi substansinya legislasi mencerminkan kepentingan publik dan strategis bagi percepatan pembangunan di daerah dan membangun kesejahteraan masyarakat³. Berdasarkan kerangka yuridis legislasi harus merupakan perangkat hukum yang mampu membangun kepastian hukum, sedangkan dari sisi praktis legislasi harus fleksibel, dapat diterima dan dipahami masyarakat⁴. DPRD

sebagai wakil rakyat bertugas menampung, menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan mendahulukan kepentingan golongan ataupun kepentingan individu. Secara legal formal sesungguhnya kewenangan yang dimiliki DPRD dalam kaitan pembentukan Peraturan Daerah sangat kuat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Walikota/Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.⁵

Meski saat ini DPRD mendapat peran yang strategi, akan tetapi masih ada pertanyaan sudah sejauh mana DPRD menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil Rakyat ?, sudah sejauh mana fungsi legislasi dijalankan oleh DPRD.

Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) yang memiliki tiga fungsi utama:

1. Fungsi legislasi (membentuk peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama).
2. Fungsi anggaran (membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD bersama kepala Daerah).
3. Fungsi Pengawasan (melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda)

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2005, hal. 105.

³ H.A.S. Natabaya, *Menata ulang sistim Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Seekjend dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 309

⁴ *Ibid.* Hal. 366.

⁵ Pasal 62 UU No. 12 Tahun 2011

dan peraturan perundang-undangan lainnya).⁶

Dalam kontek wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat berperan sebagai:

- a. *Representation*; mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan, dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat.
- b. *Advocations*; menampung aspirasi masyarakat yang komprehensif dan
- c. memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dengan adanya tawar menawar politik.
- d. *Administrative oversight*; mereview dan bila perlu berusaha menguba tindakan-tindakan dari badan Eksekutif. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa, konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Pemerintah) dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik *goods and services*.⁷

2.2. Peranserta Masyarakat Dalam Pembentukan Perda

Secara etimologis partisipasi berasal dari Bahasa Inggris kata '*participation*' yang artinya pengambilan bagian. Menurut bahasa Belanda disebut '*participatie*' yang artinya penyertaan. Bahasa Indonesia kemudian menerjemahkan Partisipasi sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Dengan demikian ada dua hal pokok dalam partisipasi yakni mengambil bagian dan penyertaan atau berperanserta. Partisipasi berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk memberi masukan dalam pembentukan Prolegda, secara bersamaan mewajibkan Pemda dan DPRD mempermudah masukan tersebut sampai pada mereka.⁸ Partisipasi bisa bersifat transitif atau intrasitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral, juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan.⁹

Perumusan definisi partisipasi masyarakat diarahkan sebagai :

1. Partisipasi sebagai kebijakan partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subyek Perda.
2. Partisipasi sebagai strategi untuk mendapat dukungan Masyarakat demi kredibilitas kebijakan.
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi agar pemerintah

⁶ Rizali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi Luas dengan pemilihan kepala Daerah secara langsung*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 105

⁷ Abdul wahab, Silincin, *analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke Implementasi kebijaksanaan negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1991

⁸ R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani, Fitria, 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm 51

⁹ Khairul Muluk, 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Bayumedia. hlm. 43.

mengetahui keinginan rakyat, dan.

4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.

Pemberlakuan otonomi daerah,¹⁰ secara normatif, merupakan peluang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Secara konseptual partisipasi merupakan implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹¹

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan *peran serta masyarakat*, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka

penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah.¹²

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam konsideran menimbang :

- a. poin b menyatakan bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting suatu negara demokratis yg menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
- b. Poin c menyatakan keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Ketentuan yuridis mengenai partisipasi masyarakat sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 namun kembali ditegaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011¹³ yaitu:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a) Rapat dengar pendapat umum; b) Kunjungan kerja; c) Sosialisasi dan/atau; d) Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004.

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diunduh tanggal 6 oktober 2011.

¹² Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *op cit*

¹³ Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*

memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi.¹⁴

Akses Informasi,¹⁵ bagi pemerintah daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi Perda dan Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya dilakukan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 92 ayat (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Pasal 92 ayat (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Adapun akses partisipasi¹⁶ dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, telah diatur secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peranserta masyarakat pada saat pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan akses partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu yang

akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan hak partisipasi terlebih dahulu kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasannya melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Pembentukan Perda diperlukan adanya aspek keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktis maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Keberadaan aspek ketebukaan dapat dilihat pada ruang partisipasi masyarakat seperti :

- (1) Pembentukan peraturan di pusat maupun daerah begitu marak dengan aneka dampaknya.
- (2) Ada ruang kebebasan, muncul kesadaran publik untuk berperan dalam pembuatan kebijakan publik.
- (3) Trend internasional mendorong *good governance* dimana partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utamanya, dan
- (4) Ada kesadaran pemerintah, DPR/DPRD tentang pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembuat kebijakan.

Jadi sangat jelas, hak masyarakat partisipasi dalam pembentukan Undang-Undang atau Perda merupakan amanat UUD, yang pada akhirnya menghasilkan

¹⁴ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan.hlm 16

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Perda yang transparansi dan partisipasi dalam-rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3. Partisipasi Prolegda

Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan berlangsung dalam struktur sosial tertentu dan demikian merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar, untuk itu penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan tidak secara otomatis berjalan lancar, manakala struktur sosial dimana perbuatan itu berlangsung tidak demokratis atau sangat tergantung dari kondisi masyarakat.¹⁷ Akhirnya peran partisipasi semakin penting dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekan *good governance* oleh Bank Dunia.

Karakteristik *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik adalah partisipasi.¹⁸ Partisipasi dibangun dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.¹⁹

Pembentukan Prolegda oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan model Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) daerah yang selama ini digunakan dalam membuat rencana pembangunan daerah dan rencana pembuatan APBD, sehingga

makna musrenbang dalam proses Prolegda adalah:

1. Bagian dari jaring aspirasi masyarakat untuk mencapai visi dan pemahaman bersama mengenai program pembangunan dan kerangka regulasi yang diperlukan;
2. Mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Menghasilkan Perda yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah yang bersangkutan dan;
4. Melahirkan Perda yang terencana dan menyatu dengan program pembangunan daerah pada umumnya.

Selain itu, mekanisme partisipasi dalam pembentukan Prolegda dapat menggunakan pola:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang ahli, independen dalam tim/keompok kerja dalam penyusunan Prolegda.
2. Melakukan public hearing melalui seminar, diskusi, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat penyusunan Perda atau musyawarah rencana Pembangunan.
3. Melakukan uji sahih terhadap Prolegda,
4. Melakukan jajak pendapat dan kontak publik melalui media masa, dan
5. Melalui lembaga pemberdayaan Masyarakat kelurahan (LPMK) atau membentuk forum warga peduli Prolegda. Pembentukan dan penyusunan Prolegda harus memberikan ruang partisipasi masyarakat sehingga *out-come* Perda menjadi berkualitas yang akhirnya Perda mencerminkan

¹⁷ Sirajuddin, dkk. 2007. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: In-TRANS Publishing. hlm 185

¹⁸ Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, 2011. *Legislatif Drafting; Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*. Yogyakarta; Total Media. hlm 54

¹⁹ *Ibid*

kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif serta dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara pembuat kebijakan dan yang terkena dampak kebijakan.

III. Penutup

1. Peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, baik dengan cara tertulis, lisan, ikut terlibat dalam diskusi atau seminar.
2. DPRD tidak dapat menolak kehendak-kemauan masyarakat melaksanakan partisipasinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kearifan lokal.

Daftar Pustaka

Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeysekere, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, ELIPS, 2001.

Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Hamidi, Jazim dan Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting; Seri Naskah Akademik*

Pembentukan Perda. Yogyakarta, 2011.

Sirajuddin, dkk. 2007. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: In-TRANS Publishing.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual)*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rizali Abdullah, 1998. *Pelaksanaan otonomi Luas dengan pemilihan kepala Daerah secara langsung*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

Soimin. 2010. *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Solly Lubis. 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: PT. Mandar Maju.

Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari. 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.